

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia saat ini tengah berada di era pandemi covid-19. Keadaan ini tentunya menjadi masalah yang serius yang dihadapi oleh Indonesia (Kontan.co.id., 30 Juni 2020). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, pandemi Corona (Covid-19) menimbulkan masalah terhadap perekonomian di dalam negeri. Yaitu pandemi ini menimbulkan masalah sosial di tengah masyarakat. Khususnya, pada saat pemerintah menjalankan berbagai langkah untuk melakukan pencegahan penyebaran Covid-19. Terutama pada usaha kecil menengah atau sektor informal yang menjadi salah satu bantalan bagi perekonomian Indonesia, saat ini pun ikut terpukul.

UMKM sebagai tulang punggung perekonomian bangsa. Menteri KemenkopUKM Teten Masduki mengatakan usaha mikro merupakan fondasi ekonomi nasional. Sebagaimana diketahui, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Pemerintah memandang penting keberadaan para pelaku UMKM. Buktinya, UMKM bersama dengan Koperasi memiliki wadah secara khusus di bawah Kementerian Koperasi dan UKM. Setidaknya, ada tiga peran UMKM yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kecil:

1. sebagai sarana mengentaskan masyarakat dari jurang kemiskinan. Alasan utamanya adalah tingginya angka penyerapan tenaga kerja oleh UMKM. Hal ini terbukti dalam data milik Kementerian Koperasi dan UMKM. Disebutkan, lebih dari 55,2 juta unit UMKM mampu menyerap sekitar 101,7 juta orang.
2. sebagai sarana untuk meratakan tingkat perekonomian rakyat kecil. UMKM juga memiliki peran yang sangat penting dalam pemerataan ekonomi masyarakat. Berbeda dengan perusahaan besar, UMKM memiliki lokasi di berbagai tempat. Termasuk di daerah yang jauh dari jangkauan perkembangan zaman sekalipun.

3. memberikan pemasukan devisa bagi negara. Saat ini, UMKM Indonesia memang sudah lumayan maju. Pangsa pasarnya tidak hanya skala nasional, tetapi internasional (Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia).

Di Indonesia, krisis tersebut berdampak besar terhadap pelaku usaha, yang 99 persen adalah usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, pemerintah akan memprioritaskan kebijakan bagi sektor UMKM dalam pembangunan ekonomi nasional (Sumber Kementerian Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Republik Indonesia, 19 Juni 2020). Pandemi Covid-19 memukul hampir semua sendi kehidupan. Perekonomian duniapun berjuang untuk bisa bergerak. Jutaan bisnis berjuang melawan kepunahan dan ekonomi anjlok setiap hari. Diberbagai belahan dunia hampir semua sektor ekonomi terpukul. Tak terkecuali di Indonesia, tidak sedikit sektor yang sangat terpukul lantaran tidak adanya omzet. Khususnya para pelaku usaha bisnis, banyak yang mengalami penurunan omzet yang mengharuskan mereka untuk gulung tikar.

Di Indonesia sendiri banyak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) masal kepada para pegawai, akibat adanya penutupan usaha akibat pandemi covid-19. Menurut kamar dagang dan industri (kadin) Indonesia, lebih dari 6,4 JT pegawai/tenaga kerja yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK (Sumber: organisasi pengusaha Indonesia yang bergerak di bidang perekonomian, 25 Juni 2020). Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (2021) menyatakan pandemi Covid-19 yang terjadi secara global tentu saja berdampak terhadap berbagai sektor. Dampak perekonomian ini tidak hanya di rasakan secara domestik, namun juga terjadi secara global. UMKM merupakan pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia. Jumlah UMKM di Indonesia yakni sebesar 64,19 juta, dimana komposisi Usaha Mikro dan Kecil sangat dominan yakni 64,13 juta atau sekitar 99,92% dari keseluruhan sektor usaha. Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak buruk terhadap UMKM. Sesuai rilis katadata Insight Center (KIC) 28 April 2021, mayoritas UMKM (82,9%) merasakan dampak negatif dari pandemic ini dan hanya sebagian kecil (5,9%) yang mengalami pertumbuhan positif. Hasil survey dari beberapa lembaga (BPS, Bappenas dan Word Bank) menunjukkan bahwa pandemic ini

menyebabkan banyak UMKM kesulitan melunasi pinjaman serta membayar tagihan listrik, gas dan gaji karyawan. Beberapa diantaranya sampai harus melakukan PHK. Kendala lain yang dialami UMKM, antara lain sulitnya memperoleh bahan baku, permodalan, pelanggan menurun, distribusi dan produksi terhambat (Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 25 April 2021).

Salah satu penggerak ekonomi nasional adalah konsumsi dalam negeri, semakin banyak konsumsi maka ekonomi akan bergerak. Konsumsi sangat terkait dengan daya beli masyarakat. Oleh sebab itu, Pemerintah telah mengalokasi anggaran sebesar Rp172,1 triliun untuk mendorong konsumsi/kemampuan daya beli masyarakat. Dana tersebut disalurkan melalui Bantuan Langsung Tunai, Kartu Pra Kerja, pembebasan listrik dan lain-lain. Pemerintah juga mendorong konsumsi kementerian/Lembaga/pemerintah daerah melalui percepatan realisasi APBN/APBD. Konsumsi juga diarahkan untuk produk dalam negeri sehingga memberikan multiplier *effects* yang signifikan (Sumber Kementerian Keuangan Republik Indonesia).

UMKM memiliki peranan yang sangat sentral, oleh karena itu UMKM harus bisa mendapatkan program – program untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan maupun perekonomian. Seperti dukungan program pemerintah dalam pemberdayaan UMKM untuk memperkuat stabilitas ekonomi. Program pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu wujud pembangunan alternatif yang menghendaki agar masyarakat mampu mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (Hamid, 2019: 10). Karena setiap pelaku usaha pasti memiliki permasalahan yang dihadapinya, seperti manajemen, produksi, pemasaran dan keuangan. UMKM harus mendapatkan pelatihan secara bertahap guna menjaga kelangsungan usahanya. Dari Humas Kementerian Koperasi dan UKM ada manfaat yang bisa didapatkan ketika mengikuti pelatihan untuk para pelaku UMKM sangatlah baik seperti:

1. Meningkatkan kualitas SDM
2. Menumbuhkan semangat dan motivasi untuk berkembang serta meningkatkan kemampuan
3. Dapat menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat

Pemberdayaan masyarakat telah cukup lama kita kenal, seiring dengan makin meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia, yang tidak hanya menimpa masyarakat di pedesaan tapi juga masyarakat perkotaan. Program pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu wujud pembangunan alternatif yang menghendaki agar masyarakat mampu mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia merupakan salah satu komitmen Pemerintah. Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kontribusi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terhadap perekonomian. Namun, berbagai program pemberdayaan UMKM yang telah dilaksanakan oleh kementerian dan lembaga (K/L) hasilnya belum optimal. Sebab itu, sinkronisasi dan harmonisasi program pemberdayaan UMKM diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, sehingga bisa meningkatkan kontribusi UMKM terhadap perekonomian. Upaya tersebut memerlukan informasi mengenai sebaran dan jenis program pemberdayaan UMKM yang lengkap serta berbagai model pelaksanaan sinkronisasi (Sumber Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) 2021). Sebagai salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi di masa pandemi Covid-19. UMKM memegang peranan penting terhadap PDB dengan kontribusinya yang mencapai 61% dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 97% dari total penyerapan tenaga kerja nasional.

Program pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu wujud pembangunan alternatif yang menghendaki agar masyarakat mampu mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Fokusnya tidak hanya pada keterlibatan pihak penerima dalam proses pembangunan tetapi juga memampukan masyarakat untuk mengawasinya guna melindungi kehidupan mereka. Sebagai suatu kegiatan yang berproses, maka seharusnya program/kegiatan pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat mengangkat kehidupan masyarakat sebagai kelompok sasaran menjadi lebih sejahtera, berdaya atau mempunyai kekuatan dalam memenuhi kebutuhan hidup yang utama, dan pada akhirnya akan menciptakan kemandirian dalam masyarakat. Tentunya kemandirian yang dimaksud tidak hanya dari aspek ekonomi saja, tetapi juga secara sosial, budaya,

hak bersuara/berpendapat, bahkan sampai pada kemandirian masyarakat dalam menentukan hak-hak politiknya.

Suatu program diharapkan akan efektif dalam pelaksanaannya. Efektivitas adalah kesesuaian antara output dengan tujuan yang ditetapkan (Fausiah, 2016). Efektivitas dapat digunakan sebagai suatu alat evaluasi efektif atau tidaknya suatu tindakan (Saputra, 2019). Secara umum pengertian efektivitas menunjuk pada hasil yang dicapai, dalam arti bahwa suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut berhasil dilaksanakan dengan baik. Program pemberdayaan masyarakat perlu dievaluasi tingkat keefektifannya agar sasaran atau tujuan yang ditetapkan dapat tercapai, sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya dapat disebut efektif. Efektivitas program dapat dirumuskan sebagai tingkat perwujudan sasaran yang menunjukkan sejauh mana sasaran program yang telah ditetapkan. Pengukuran efektivitas dapat dilakukan dengan melihat hasil kerja yang dicapai oleh suatu organisasi. Efektivitas dapat diukur melalui berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan-tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif. Program pemberdayaan masyarakat perlu dievaluasi tingkat keefektifannya agar sasaran atau tujuan yang ditetapkan dapat tercapai, sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya dapat disebut efektif.

Program pendampingan UMKM juga dilakukan oleh PT. Miwon Indonesia dan Dompot Dhuafa untuk para pedagang bakso. Dompot Dhuafa berperan dalam hal penyeleksian pedagang, pengadaan perlengkapan usaha. Bahkan juga sampai pemberian pendampingan intensif terhadap aspek kemajuan dan keamanan bisnis pedagang bakso. Program ini dilatar belakangi oleh kepedulian dari Miwon dan Dompot Dhuafa atas kondisi para pedagang bakso di skala mikro yang masih terbatas dalam aspek produksi, managerial dan pemasaran. Bentuk penguatan yang dilakukan yakni melalui bantuan modal usaha dan pendampingan usaha selama setahun. Komitmen membantu memperkuat eksistensi para pedagang bakso agar tetap bertahan, mandiri dan mampu bersaing. Para pedagang tangguh tersebut masing-masing menerima satu gerobak bakso, peralatan masak, gas dan tabung, satu paket pruduk

Miwon dan uang binaan 1 juta. Mereka akan dibina oleh Dompot Dhuafa selama satu tahun terkait pengelolaan dana, cara mendapat sertifikat halal dan cara masak yang sehat dan higienis. Dengan demikian, program pemberdayaan bisa dilakukan dengan menciptakan lapangan pekerjaan, bantuan modal dan pendampingan. Dalam hal ini diperlukan pembinaan-pembinaan oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun instansi terkait kepada masyarakat dalam upaya kesejahteraan dan kualitas hidupnya. Program pemberdayaan masyarakat melalui bantuan modal kepada para pedagang bakso di seluruh Indonesia telah dilakukan oleh PT Miwon sejak tahun 2011. Dompot dhuafa juga melaksanakan program pendampingan tersebut di Jakarta, dimana pada saat ini banyak bermunculan pedagang bakso yang terdiri dari masyarakat koeban Pemberhentian Hak Kerja (PHK) atau masyarakat yang berusaha mencari peluang usaha dalam menghadapi kondisi pandemic covid 19 saat ini.

Adanya pendampingan ini diharapkan mampu memberikan dampak positif serta memberikan pengetahuan secara luas dan secara langsung melatih UMKM agar lebih kompeten dan mampu memunculkan inovasi inovasi baru dalam mendirikan usaha. Karena UMKM memiliki banyak peranan penting, dijelaskan oleh bappenas, bahwa peran UMKM terdiri atas;

1. Perluasan kesempatan kerja dan penyerapan tenaga kerja.
2. Pembentukan produk domestik bruto (PDB)
3. Penyediaan jarring pengaman terutama bagi masyarakat berpendapatan rendah untuk menjalankan kegiatan ekonomi produktif.

Tak hanya program pendampingan saja tetapi kesejahteraan masyarakat juga menjadi prioritas. Menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2009, tentang kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, masalah terbesar yang dihadapi Ibu Kota saat ini adalah ketimpangan kesejahteraan. Pernyataan itu disampaikan dalam acara penandatanganan kerja sama antara Pemrov DKI Jakarta, Baznas, Baziz Provinsi DKI Jakarta, dan tiga yayasan sosial lainnya. Anies Baswedan mengatakan bila dahulu

masyarakat berekonomi lemah atau rentan jumlahnya lebih sedikit, ketika masa pandemi meningkat agak besar. Untuk itu diperlukan keseriusan semua pihak untuk membuat program kesejahteraan rakyat secara langsung, khususnya pada aspek pendidikan dan usaha mikro dan kecil. Kelompok pendidikan dan usaha mikro kecil dinilai memberikan kontribusi besar menopang perekonomian Jakarta. Sebagian besar, 60 persen perekonomian Jakarta ditopang konsumsi. Maka bila bisa diperbaiki kelompok ini, akan berdampak signifikan untuk perekonomian di Jakarta. Data kemiskinan di DKI Jakarta diunggah Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta yang dirilis 15 Februari 2021, jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta per September 2020 mencapai 496.840 orang, atau sebanyak 4,68 persen dari jumlah penduduk DKI Jakarta. Penduduk miskin tersebut bertambah 15.980 orang dibandingkan dengan Maret 2020.

Dari penjelasan diatas penelitian yang telah dilakukan dan berkaitan dengan judul ini yaitu:

1. Anshar (2020): Penerapan Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Muslim di Kelurahan Perintis Medan.
2. Lasmiatun (2017): Pemberdayaan Ekonomi Rumah Tangga, Pengusaha Mikro dan Kecil Melalui Literasi Keuangan Di Jawa Tengah dan Yogyakarta.
3. Rosita., & Simanjuntak (2022): Efektivitas Program Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai.
4. Gorahe., Waani., & Tasik (2021): Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Dalako Bembanehe Kecamatan Tatoareng Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Berdasarkan dari penelitian-penelitian tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa state of the art pada penelitian ini adalah belum ada yang melakukan penelitian mengenai efektivitas program pendampingan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sektor makanan di Jakarta. Selain itu Program pendampingan UMKM pedagang bakso yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa belum pernah dilakukan

penelitian mengenai tingkat efektivitas kegiatan-kegiatan pendampingannya. Hal ini yang mendorong peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan tema ini

Topik ini harus dikaji dan dibahas lebih mendalam guna untuk menginformasikan tindakan, membuktikan teori, dan berkontribusi dalam mengembangkan pengetahuan di bidang terkait. Pentingnya penelitian ini dibahas guna sebagai alat untuk membangun pengetahuan dan memfasilitasi pembelajaran, selanjutnya untuk memahami berbagai masalah dan meningkatkan kesadaran public terutama UMKM, untuk menemukan mengukur dan merebut peluang, mencari solusi atas sebuah permasalahan dan mendapatkan jawaban atas fenomena yang terjadi.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas apa yang harus dilakukan oleh pelaku usaha agar dapat terus menjalankan bisnisnya di era pandemi covid-19 dan tetap bertahan dalam kondisi pandemi ini. Berdasarkan pemaparan fenomena-fenomena yang terjadi selama pandemi covid-19 di Indonesia, maka perlu untuk melakukan pengkajian melalui penelitian ini dengan judul **“Efektivitas Program Pendampingan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Sektor Makanan Dampak Pandemi Covid 19 Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”**”.

1.2 Rumusan Masalah

Mencermati kondisi yang telah dijelaskan di atas maka dalam penelitian ini dirumuskan masalah penelitian: Bagaimana Efektivitas program pendampingan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sektor makanan dalam masa pandemic covid 19 dalam rangka peningkatan kesejahteraan pedagang bakso?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas program pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan usaha mikro dalam peningkatan kesejahteraan para pedagang bakso di Jakarta yang dilaksanakan oleh PT. Miwon-Dompot Dhuafa.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Pelaku UMKM, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bermanfaat bagi pelaku UMKM.
2. Bagi Dompok Dhuafa, penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan masukan mengenai efektivitas program pendampingan serta dampak pandemi terhadap kesejahteraan masyarakat agar program selanjutnya lebih baik dan efektif dalam pelaksanaannya.
3. Bagi Mitra Pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi maupun acuan agar pemerintah berperan dalam memberikan kebijakan dan dukungan terhadap program pendampingan UMKM.
4. Bagi Mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan serta pengetahuan dan menjadi acuan atau referensi bagi pembaca lain atau ingin meneliti dibidang yang sama.